

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki fungsi dalam membangun masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu proses kemajuan dan perbaikan secara terus menerus yang disebut dengan pembangunan yang salah satunya melalui pembangunan daerah. Todaro mengemukakan bahwa “jika suatu negara menghendaki pembangunan yang lancar dan berkesinambungan, maka ia harus memulainya dari daerah pada umumnya, dan sektor pertanian pada khususnya”¹. Jadi, pembangunan di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sebagai pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

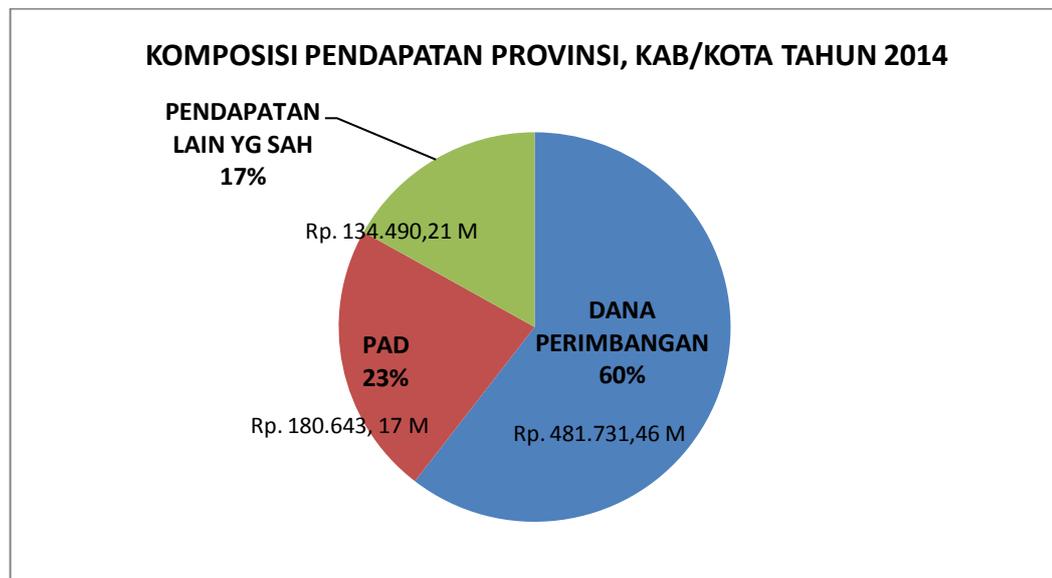
Pemerintah Indonesia saat ini telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan di daerahnya melalui otonomi daerah. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah otonom memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu wewenang tersebut adalah dalam hal keuangan daerah dimana menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004, keuangan daerah adalah kewenangan dan kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangan

¹ Michael P.Todaro dan Stephen C.Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh (Jakarta:Erlangga, 2000), p.432

sendiri, yang didukung dengan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah serta dari Provinsi ke Kabupaten/Kotamadya yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi tolak ukur kemandirian daerah.

Kemandirian suatu daerah dapat diwujudkan bila pemerintah daerah dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerah sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan dalam melakukan pembangunan di daerahnya. Diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan, yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya untuk mengurangi ketergantungan daerahnya pada pemerintah pusat dengan cara menggali potensi dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki sebagai sumber PAD. Dengan adanya PAD yang besar, menunjukkan bahwa masyarakat di daerah tersebut memiliki partisipasi yang besar dalam menanggung biaya pembangunan dan pemerintahan.



Sumber: Media Keuangan Daerah, 2014

Gambar I.1
Komposisi Pendapatan Provinsi, Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
Tahun Anggaran 2014

Gambar I.1 menunjukkan bahwa Komposisi Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota se-Indonesia yaitu sebesar 60,45% atau Rp. 481731, 46 Miliar, PAD sebesar 22,67% atau Rp. 180.643,17 miliar, dan pendapatan lain yang sah sebesar 16,88% atau Rp.134.490,21 miliar. Dengan demikian, ketergantungan daerah pada Kabupaten dan Kota pada dana perimbangan masih sangat dominan, karena peran PAD masih relatif kecil dalam menyumbang pendapatan daerah kabupaten dan kota. Untuk mengurangi ketergantungan daerah tersebut, maka pemerintah daerah perlu menggali sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah yang besar, salah satunya melalui sektor pariwisata.

Sektor pariwisata sebagai kegiatan perekonomian telah menjadi andalan potensial dan prioritas pengembangan bagi sejumlah negara. Sektor ini memegang peranan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan di Asia Pasifik.² Pada abad 21 saat ini, pertumbuhan pariwisata sudah berkembang menjadi suatu industri terbesar dan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan paling pesat dalam perekonomian dan jasa-jasa. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh World Tourism Organization (WTO) bahwa,

*“Over the decades, tourism has experienced continued growth and deepening diversification to become one of the fastest growing economic sectors in the world. This global spread of tourism in industrialised and developed states has produced economic and employment benefits in many related sectors - from construction to agriculture or telecommunications. Today, the business volume of tourism equals or even surpasses that of oil exports, food products or automobile”.*³

Sektor pariwisata sebagai ekspor non migas jika dikembangkan secara berencana dan terpadu, dapat melebihi sektor migas (minyak bumi dan gas alam) serta industri lainnya. Selain menghasilkan devisa, pariwisata juga berfungsi sebagai katalisator pembangunan dan *quick yielding industry* dimana sektor ini mampu menghasilkan lebih cepat dan memberikan *multiplier effect* (efek ganda) terhadap munculnya sektor-sektor usaha lainnya yang berdampak pada terciptanya kesempatan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan meningkatnya

² Widi Agustian, *Pentingnya Industri Pariwisata untuk RI*, 2013, <http://economy.okezone.com/read/2013/10/05/320/876933/pentingnya-industri-pariwisata-untuk-ri> (diakses pada tanggal 7 Januari 2015)

³ WTO, *Why Tourism?*, 2014, <http://www2.unwto.org/content/why-tourism> (diakses pada tanggal 7 Januari 2015)

penerimaan negara atau daerah.⁴ Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju, tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang termasuk pula Indonesia.

Indonesia adalah sebuah negara *archipelago* yang dianugerahi oleh Tuhan dan memiliki kesempatan yang sangat besar dalam pengembangan kepariwisataan sebagai sektor andalan penerimaan devisa ekspor. Kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Indonesia merupakan komponen penting pariwisata Indonesia. Dalam kedudukannya di dunia pun Indonesia memiliki daya saing yang cukup tinggi.

Tabel I.1

Posisi Daya Saing Industri Pariwisata Indonesia Tahun 2014-2015

Negara	Rangking Regional	Rangking Internasional	Rangking Sumberdaya Kultural	Rangking Harga Kompetitif
Indonesia	4	50	30	3

Sumber : *World Economic Forum*, diolah oleh peneliti, 2015

Tabel I.1 tersebut menunjukkan daftar peringkat daya saing pariwisata Indonesia yang dilansir oleh *World Economic Forum* (2015), posisi Indonesia terus merangkak naik setiap tahunnya. Kini pada tahun 2015, peringkat daya saing Indonesia meningkat signifikan yaitu berada di urutan ke-50 dunia dan peringkat 4 di ASEAN yaitu setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Pada tahun 2011, ranking daya saing Indonesia berada di urutan ke-74 di antara negara-negara di dunia ini. Sedangkan di tahun 2013, naik ke posisi 70. Artinya, dalam dua tahun terakhir terdapat perbaikan signifikan pada bidang-bidang yang mendukung

⁴ Oka. A.Yoeti, *Ekonomi Pariwisata, Introduksi, Informasi, dan Implementasi* (Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2008), p.1

pariwisata. Kekuatan industri pariwisata di Indonesia yang utama terletak pada sumber daya alam dan kekayaan ragam budaya, serta biaya yang relatif murah.⁵

Pariwisata Indonesia juga memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi Indonesia dan sebagai penyumbang devisa ekspor Indonesia. Pada tahun 2008 industri pariwisata Indonesia berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 153,25 triliun atau 3,09% dari total PDB Indonesia (BPS, 2010). Pada tahun 2009 pertumbuhan PDB pariwisata mencapai 8,18%, sedangkan PDB nasional hanya 4,37%. Rata-rata kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Nasional pada periode 2010 – 2012 adalah sebesar 3,98%, dimana tahun 2012 kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional adalah sebesar 3,90% dengan total nilai sebesar 296,97 triliun rupiah.⁶

Sektor pariwisata merupakan usaha yang pada umumnya menjanjikan sebagai penghasil devisa bagi negara. Sebagai peluang bisnis dalam menghadapi resesi global, maka pengembangan sektor pariwisata perlu mendapat perhatian khusus karena dapat dijadikan sebagai peluang bisnis dalam perekonomian dunia. Terlebih bagi Indonesia yang terdiri dari 33 provinsi dimana setiap provinsi memiliki potensi wisata yang cukup tinggi, maka potensi pariwisata harus dikembangkan sebagai program utama dalam meningkatkan pendapatan negara.

Prospek sektor pariwisata yang cerah saat ini, masuknya era otonomi daerah, dan dalam rangka menghadapi MEA 2015 (Masyarakat Ekonomi Asean) membuat pembangunan pariwisata mendapat prioritas baik oleh pemerintah pusat,

⁵SMM Berlin, *Pariwisata Indonesia Lampau Pertumbuhan Ekonomi*, 2014, <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/06/202559869/Pariwisata-Indonesia-Lampau-Pertumbuhan-Ekonomi> (diakses pada tanggal 26 Maret 2015)

⁶Eko Adi Waluyo, *Daya Saing Pariwisata Indonesia Terus Meningkat*, 2015, <http://marketeers.com/article/daya-saing-pariwisata-indonesia-terus-meningkat.html> (diakses pada tanggal 16 Januari 2016)

pemerintah daerah maupun swasta sebagai bagian dari pembangunan nasional, hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan pariwisata sebagai komoditas non migas sebagai penghasil devisa negara dan meningkatkan penerimaan daerah. Selain itu sub sektor ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi rakyat, karena sektor ini dianggap sebagai sektor yang paling siap dari segi fasilitas, sarana, dan prasarana dibandingkan dengan sektor lainnya.⁷

Potensi pariwisata di Indonesia sangatlah besar, membentang dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai Provinsi Papua dengan segala keanekaragaman objek pariwisata. Berdasarkan data dari BPS, beberapa Provinsi di Indonesia yang paling sering dikunjungi wisatawan menurut BPS yaitu Bali, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Lombok (NTT).⁸

Tabel I.2

Daerah yang Paling Banyak Dikunjungi Minat Wisman dan Wisnus 2014

No.	Daerah	No	Daerah
1.	Bali	6.	Jawa Barat
2.	DKI Jakarta	7.	DI Yogyakarta
3.	Kepulauan Riau	8.	Nusa Tenggara Barat
4.	Sumatera Utara	9.	Sumatera Barat
5.	Jawa Timur	10.	Lombok (NTT)

Sumber: *Statistics Indonesia*, 2014

⁷ Kemensesneg RI, *Pariwisata*, 2010, <http://www.indonesia.go.id/en/potential/tourism> (diakses pada tanggal 7 Januari 2015)

⁸ Juli Antara, *Prospek Industri Pariwisata di Indonesia*, <http://www.globalstats-research.com/prospek-industri-pariwisata-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 7 Januari 2015)

Data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa ke-10 daerah tersebut merupakan daerah utama yang banyak diminati oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara di Indonesia. Dari ke 10 daerah tersebut Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang mampu menarik minat wisatawan. Provinsi Jawa Barat juga telah ditetapkan sebagai tujuan wisata nasional oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dikarenakan karena Provinsi Jawa Barat memiliki aksesibilitas yang mudah, posisi yang strategis, dan merupakan *overland*-nya Jawa dan Bali. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki banyak objek wisata, baik objek wisata alam, buatan, maupun minat khusus yang sudah terkenal baik di dalam maupun luar negeri.

Sektor pariwisata saat ini merupakan andalan pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat dan menjadi sumber PAD Kedua.⁹ Pada tahun 2011, didominasi besarnya kontribusi dari sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 37,16%, sektor pariwisata melalui sektor perdagangan, hotel dan restoran (22,58%), dan sektor pertanian (11,98%). Selain ketiga sektor diatas, sektor lainnya yang memiliki kontribusi cukup besar adalah sektor jasa (9,17%), dan sektor pengangkutan dan komunikasi (7,70%). Pada tahun 2012, kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 41,55%, dengan nilai sebesar Rp. 7,60 trilyun.¹⁰

⁹ DPR RI, Laporan Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Masa Reses I Tahun Sidang 2014-2015 ke Provinsi Jawa Barat, <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-12-568db4d86f43fe65a7c9b0deab7e4cb5.pdf> (diakses pada tanggal 7 Januari 2015)

¹⁰ Bappenas, *Profil Pembangunan Jawa Barat*, <http://simreg.bappenas.go.id/document/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203200JaBar%202013.pdf> (diakses pada tanggal 21 Maret 2015)

Sektor pariwisata di Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan dapat menjadi salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) walaupun masih terdapat banyak masalah dalam pengembangannya. Permasalahan utama pariwisata di Jawa Barat saat ini adalah masalah perizinan, penegakan hukum, aksesibilitas, destinasi, infrastruktur dan anggaran pariwisata yang minim.¹¹ Dari beberapa masalah yang dikemukakan, masalah yang cukup penting adalah masalah revitalisasi destinasi wisata di Jawa Barat seperti sarana jalan, transportasi publik, bandara, stasiun kereta api, dan sarana lainnya yang sangat berpengaruh pada minat wisatawan asing untuk mengunjungi destinasi wisata.

Tabel I.3
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2004-2014

Tahun	Penerimaan PAD Sektor Pariwisata	PAD Prov. Jawa Barat	Kontribusi (%)
2004	151.392.855.716	1.289.679.600.000	11,74
2005	195.513.135.260	1.429.625.050.000	13,68
2006	255.462.344.111	1.484.780.050.000	17,21
2007	280.176.995.342	2.054.016.888.625	13,64
2008	289.129.492.430	2.421.803.969.104	11,94
2009	326.169.531.381	2.750.774.000.000	11,86
2010	337.077.887.041	3.289.494.780.105	10,25
2011	377.682.821.458	4.509.856.610.486	8,37
2012	583.699.030.837	5.225.378.763.674	11,17
2013	601.322.100.081	5.700.012.300.056	10,54
2014	720.003.401.112	6.502.542.603.701	11,07

Sumber : *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jawa Barat, Kementerian Keuangan*, diolah oleh peneliti, 2015

¹¹Tri Wahono, *Masalah Pariwisata Jabar Sudah 40 tahun*, <http://regional.kompas.com/read/2010/07/25/21124826/Masalah.Pariwisata.Jabar.Sudah.40.Tahun> (diakses pada tanggal 22 Maret 2015)

Tabel I.3 menunjukkan bahwa dalam sebelas tahun terakhir, sumbangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp. 377.682.821,458,- atau 8,37% dari total PAD. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar RP. 255.462.344.111 atau 17,21% dari total PAD. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa angka PAD Jawa Barat menunjukkan kenaikan setiap tahunnya namun kontribusi PAD sektor pariwisata belum menunjukkan angka yang maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh angka kontribusi yang rata-rata banyak mengalami penurunan daripada kenaikan di setiap tahunnya.

Industri pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu industri yang terdiri dari serangkaian perusahaan yang menghasilkan jasa atau produk yang berbeda satu dengan lainnya. Industri pariwisata pada umumnya terdiri dari obyek wisata, hotel, restoran, *artshop*, agen dan biro perjalanan dan lain sebagainya. Sejauh ini andalan sektor pariwisata Jawa Barat berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi objek wisata, dimana pajak hotel merupakan pos pajak yang memiliki andil besar dalam penerimaan pajak daerah sektor pariwisata yang menyumbang hampir 50% dari total PAD sektor pariwisata.¹²

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa objek wisata. Disamping itu,

¹²Bandung Raya, *Pariwisata Jabar Masih Menjadi Andalan*, <http://www.pikiran-rakyat.com/node/130916> (diakses pada tanggal 24 Maret 2015)

dalam konsep pariwisata, objek atau destinasi pariwisata merupakan unsur paling kuat (vital) dalam dunia kepariwisataan sebagai daya tarik dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Provinsi Jawa Barat memiliki banyak potensi di bidang pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan dengan banyaknya objek wisata yang dimiliki.

Tabel I.4
Jumlah Objek Wisata di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2014

Tahun	Jumlah Objek Wisata	Pertumbuhan (%)
2004	344	-
2005	360	4,65
2006	412	14,44
2007	525	27,4
2008	535	19,04
2009	514	-3,92
2010	510	-0,77
2011	517	1,37
2012	572	10,63
2013	575	0,52
2014	577	0,34

Sumber : *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jawa Barat*, diolah oleh peneliti, 2015

Tabel I.4 diatas menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki banyak potensi objek wisata yang dapat dikembangkan. Namun, besarnya potensi tersebut masih belum dikelola secara maksimal, masih ada sekitar 50% potensi wisata Jawa Barat yang masih belum tergali dan masih buruknya infrastruktur khususnya jalan menuju objek-objek wisata tersebut.¹³ Dalam kurun waktu 2004-2014 pertumbuhan jumlah objek wisata di Jawa Barat juga selalu berfluktuasi. Pada

¹³ Jadikan Jabar Provinsi Pariwisata, <http://www.jabarmedia.com/2013/09/menuju-jabar-provinsi-pariwisata/> (diakses tanggal 23 Maret 2015)

tahun 2004-2008 pertumbuhan jumlah objek wisata selalu mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun pada tahun 2009 dan 2010 mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan dengan adanya pengurangan jumlah objek wisata. Hal ini dikarenakan pada tahun 2009 dan 2010 beberapa objek wisata belum dikelola secara maksimal dan pembenahan terhadap infrastruktur belum dilakukan. Pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 0,52 persen dan 0,34 persen dengan jumlah objek wisata terakhir sebesar 577 unit. Adanya beragam objek wisata yang ditawarkan di Provinsi Jawa Barat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah tabel tentang kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) yang berkunjung ke objek wisata di Provinsi Jawa Barat.

Tabel I.5
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara & Wisatawan Mancanegara
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2014

Tahun	Jumlah Wisnus & Wisman (Orang)	Pertumbuhan (%)
2004	16.850.793	-
2005	17.097.981	1,47
2006	25.563.238	49,5
2007	24.121.261	-5,64
2008	26.230.748	8,74
2009	29.043.426	10,72
2010	25.787.340	-11,21
2011	28.219.875	9,43
2012	28.679.423	1,63
2013	32.013.554	11,62
2014	35.118.901	9,70

Sumber : *Disparbud Prov.Jawa Barat*, diolah oleh peneliti, 2015

Tabel I.5 diatas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata selalu mengalami fluktuasi. Penurunan kunjungan wisatawan pada tahun 2007 dan tahun 2010 kunjungan wisatawan ke objek wisata mengalami penurunan sebesar 5,64% dan 11,21%. Peningkatan kunjungan wisatawan terbesar terjadi pada tahun 2006 dengan peningkatan sebesar 49,5% sedangkan pada tahun-tahun lainnya kenaikan kunjungan belum menunjukkan angka yang signifikan. Pada tahun 2010 jumlah objek wisata di Provinsi Jawa Barat mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya sehingga berdampak pada menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata. Adanya kunjungan wisatawan ke Provinsi Jawa Barat pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung tersebut antara lain karena keindahan dan panorama yang indah, beriklim sejuk, keramahtamahan masyarakat, dan memiliki berbagai jenis objek dan atraksi pariwisata.

Salah satu kebutuhan wisatawan selain atraksi wisata adalah kebutuhan untuk beristirahat. Bagi wisatawan yang datang dari luar daerah telah disediakan Hotel, Losmen dan Penginapan untuk pengunjung yang ingin menginap. Hotel berfungsi bukan saja sebagai tempat menginap untuk tujuan wisata namun juga untuk tujuan lain seperti menjalankan kegiatan bisnis, mengadakan seminar atau sekedar mendapatkan ketenangan. Berbagai jenis hotel berbintang maupun melati menjadi pilihan bagi wisatawan untuk menikmati kunjungannya ke kota pariwisata. Berikut adalah persentase tingkat hunian kamar secara rata-rata pada hotel bintang dan hotel melati tahun 2004-2014 di Provinsi Jawa Barat.

Tabel I.6
Tingkat Hunian Hotel Bintang dan Melati (%)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2014

Tahun	Jumlah Hotel Bintang	Tingkat Hunian Hotel Bintang	Jumlah Hotel Melati	Tingkat Hunian Hotel Melati
2004	128	37,77	1062	27,48
2005	136	37,00	994	32,18
2006	127	38,63	1010	36,95
2007	131	39,39	1332	29,25
2008	161	40,26	1295	28,20
2009	166	41,40	1364	28,21
2010	178	43,49	1378	29,12
2011	198	45,78	1377	32,89
2012	210	45,92	1442	34,67
2013	214	48,22	1451	30,32
2014	220	48,60	1457	32,08

Sumber: *Badan Pusat Statistik RI*, 2014

Berdasarkan tabel I.6 dapat diketahui bahwa tingkat hunian hotel bintang maupun hotel melati di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2004-2014 berfluktuasi dan belum menunjukkan angka yang maksimal karena rata-rata tingkat hunian hotel yang hanya mencapai 42%. Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Jabar Herman Muchtar, okupansi hotel di Jabar rata-rata 42 persen. Di Bandung lebih tinggi sebesar 52 persen tapi belum memenuhi angka yang cukup baik, minimal 60 persen. Angka okupansi tersebut masih cukup memprihatinkan dan menunjukkan bahwa potensi pariwisata di Jawa Barat belum dimanfaatkan secara maksimal (Kompas.Com, 25 Juli 2010). Pada tahun 2004-2014 tingkat hunian pada hotel berbintang cenderung selalu mengalami peningkatan berbeda dengan tingkat hunian kamar pada hotel melati yang berfluktuasi. Jika dilihat dari data tingkat hunian kamar, orang-orang lebih

cenderung memilih tempat untuk beristirahat di hotel berbintang meskipun jumlah hotel melati lebih besar.

Selain objek wisata, kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel, restoran dan bar sebagai salah satu fasilitas pariwisata yang bersifat fisik memiliki peranan yang cukup signifikan dalam menentukan tempat tujuan berlibur wisatawan. Restoran berperan sebagai penyedia jasa, makan dan minum bagi orang-orang yang sedang berada jauh dari tempat tinggalnya. Pemerintah daerah dapat memungut pajak dari setiap restoran yang ada di daerahnya. Semakin banyak jumlah restoran, maka penghasilan pajak yang diterima akan semakin besar.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Terdapat pengaruh jumlah objek wisata terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat.
2. Terdapat pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat.
3. Terdapat pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat.
4. Terdapat pengaruh jumlah restoran terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat.
5. Terdapat pengaruh tingkat hunian hotel terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat.

C. Pembatasan Masalah

Dari 5 identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi ruang lingkup dengan meneliti:

1. Pengaruh jumlah objek wisata terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat.
2. Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat.
3. Pengaruh tingkat hunian hotel terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat.
4. Pengaruh jumlah objek wisata, jumlah kunjungan wisatawan, dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang dirumuskan adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh jumlah objek wisata terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah terdapat pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat hunian hotel terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat?

4. Apakah terdapat pengaruh jumlah objek wisata, jumlah kunjungan wisatawan, dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini baik secara teoretis maupun praktis mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu ekonomi dan pembangunan serta diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan mengenai pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan pemahaman mengenai kontribusi sektor pariwisata kepada pemerintah/ instansi (terkait).